

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekayaan alam dan keberagaman Bangsa Indonesia menyimpan banyak potensi sekaligus peluang yang tinggi untuk membangun kepariwisataan Indonesia agar dapat terkenal hingga dunia serta memiliki karakteristik berdasar kearifan lokal yang ada. Dalam hal ini pemerintah memiliki peran penting dalam menggali potensi dan membuat kebijakan terhadap pengembangan kepariwisataan, sehingga masyarakat lokal tergugah kesadarannya untuk menggali potensi dan bergerak membangun desanya.

Kepedulian dan komitmen, serta peran pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kepariwisataan telah diatur dan tertuang dalam UU No. 10 Tahun 2009 pengganti UU No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata yang menyebutkan bahwa dampak yang terjadi akibat dari pengembangan kepariwisataan berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran, serta pelestarian lingkungan hidup.

Dalam upaya melaksanakan program pembangunan pariwisata, pemerintah Kabupaten Sleman berusaha meningkatkan citra positif daerah dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya atau potensi pariwisata yang dimiliki. Bermodal kondisi alam yang dimiliki, keragaman masyarakat dan budaya yang berkualitas, maka pengembangan sektor pariwisata berbasis masyarakat dianggap

potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Sleman. Dalam kebijakan pembangunan daerah, pemerintah Kabupaten Sleman menetapkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan yang mendorong pembangunan di Kabupaten Sleman. Kontribusi yang dapat diandalkan pada pembangunan ekonomi Kabupaten Sleman yaitu pada sektor pariwisata karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

Wilayah Yogyakarta tepatnya dibagian utara yaitu kawasan wisata gunung merapi. Gunung Merapi yang berdiri di 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Sleman (DIY), Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten yang ketiganya termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, merupakan gunung berapi paling aktif di Indonesia yang terakhir meletus pada tahun 2010 tepatnya pada tanggal 26 Oktober 2010. Kini kehidupan di wilayah tersebut khususnya di wilayah Kabupaten Sleman sudah pulih kembali dan normal seperti dahulu sebelum terjadi erupsi. Dalam kehidupan di lereng gunung merapi sudah terbentuk seperti ikatan sosial, budaya, dan ekonomi yang tidak bisa lepas dari masyarakat yang bertempat tinggal disekitar lereng gunung merapi. Antropolog Universitas Gajah Mada, PM Laksono, mengatakan bahwa masyarakat lereng gunung merapi menyikapi alam dengan mencoba memahami gejalanya. Dalam posisi itulah ilmu pengetahuan menghadai tantangan dalam upaya menjelaskan berbagai gejala alam yang terjadi.

Meletusnya Gunung Merapi memberikan kerusakan cukup besar di suatu wilayah yang terkena dampak langsung. Erupsi Gunung Merapi yang terjadi di Kabupaten Sleman Yogyakarta pada tanggal 26 Oktober sampai November 2010 tahun lalu, merupakan letusan terbesar selama 140 tahun terakhir. Erupsi ditahun

2010 telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, kerugian dan ancaman baik aspek fisik, ekonomi dan psikologi.

Setelah terjadi erupsi pada tahun 2010, perkembangan sektor pariwisata dikawasan tersebut semakin berkembang dan tentu saja menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat luas dan lebih khususnya bagi masyarakat setempat. Destinasi wisata yang ada dikawasan gunung merapi lebih memberikan suasana yang kental dengan alam dan berkaitan dengan suguhan pariwisata yang seru dan menantang. Pengelolaan destinasi pariwisata yang berada dikawasan Gunung Merapi dinaungi oleh suatu kelompok yang dinamakan dengan 'Vulcano Tour'. Para wisatawan dapat berkunjung untuk melihat material erupsi gunung merapi dan juga bekas-bekas ataupun penemuan-penemuan yang disebabkan oleh adanya erupsi letusan gunung merapi tahun 2010 silam. Dalam kunjungannya, para wisatawan dapat berkeliling dengan menggunakan jasa jeep wisata ataupun trail yang dikelola oleh warga setempat.

Dalam menjalankan pemberdayaan ekonomi di obyek wisata 'Vulcano Tour' tidak terlepas dari adanya partisipasi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi di sekitar obyek wisata 'Vulcano Tour' diharapkan dapat memajukan obyek wisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjadi pengelola obyek wisata 'Vulcano Tour', menjadikan rumahnya sebagai *homestay* untuk wisatawan yang berkunjung, berjualan makanan, pakaian, buah, tanaman hias dan biro jasa mobil jip sebagai alat transportasi.

Menurut Peraturan Bupati Sleman No. 20 Tahun 2011 Bab III Bagian Kesatu Pasal 5 Ayat 1 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Merapi bahwa Kecamatan Cangkringan merupakan kawasan rawan bencana Merapi pada zona III yang dikategorikan sebagai wilayah rusak, terkena dampak langsung akibat awan panas, aliran lahar dan abu Vulkanik. Letusan Gunung Merapi yang bisa terjadi sewaktu-waktu sangat mengkhawatirkan kehidupan masyarakat. Hal ini mengakibatkan masyarakat yang tinggal di Desa Umbulharjo telah melakukan adaptasi sedemikian rupa, sehingga kelangsungan hidup terus berlangsung hingga saat ini.

Dalam Peraturan Bupati Sleman No. 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi pada Bab III Bagian Kedua mengenai Kebijakan dalam Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi Pasal 6 menyebutkan tentang kawasan rawan bencana Merapi III pada intinya bahwa Desa Umbulharjo diberi prioritas pengembangan kegiatan untuk penanggulangan bencana, pemanfaatan sumber daya air, hutan, pertanian lahan kering, konservasi, ilmu pengetahuan, penelitian, dan wisata alam (*ecoTourism*). Berdasarkan prioritas tersebut, tumbuhlah inisiatif dari masyarakat di Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan untuk membangun perekonomian regional setempat melalui sebuah inovasi wisata alam. Wisata alam yang dikembangkan oleh masyarakat di daerah setempat berupa Vulcano Tour. Vulcano Tour merupakan suatu organisasi yang bergerak pada objek wisata petualangan yang menyuguhkan keindahan alam sekitar lereng Merapi. Organisasi yang bergerak dibidang pariwisata Mobil Jeep, Motor Trail dan Jasa Ojek dengan memberikan pelayanan

kepada wisatawan untuk lebih mengenal dan melihat sisa porak-poranda sejarah meletusnya erupsi Gunung Merapi pada tanggal 26 Oktober 2010 tahun lalu. Wisata alam tersebut dikembangkan oleh masyarakat setempat dengan bertujuan sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat pasca erupsi Merapi. Paling tidak terdapat tiga pemangku kepentingan demi mengembangkan destinasi kepariwisataan di Indonesia, antara lain: (1) Pihak pemerintah pusat/ daerah, (2) Pihak swasta atau industri, (3) Pihak masyarakat sebagai pelaku kegiatan/ sebagai tuan rumah.

Dalam hal pengelolaan kawasan wisata, Vulcano Tour dan Pemerintah Desa Umbulharjo bekerjasama menjalin kesepakatan kerja/ MOU dengan pihak kedua yaitu tim pengelola kawasan Vulcano Tour Desa Umbulharjo. Kemitraan yang dijalankan dapat dilihat dari terbentuknya Peraturan Desa Umbulharjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Kawasan Wisata Vulcano Tour. Selain itu, terdapatnya pembentukan struktur susunan tim pengelola wisata desa yang meliputi adanya pelindung dari pihak Kecamatan Cangkringan, adanya ketua dari pihak pemerintah desa, adanya sekretaris, bendahara, dan koordinator lapangan hal ini mencerminkan para pelaku berkolaborasi sebagai wujud transparansi kegiatan Vulcano Tour Desa Umbulharjo. Sementara itu, dari pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman hanya membantu dalam bentuk sosialisasi, peningkatan SDM dan promosi (wawancara dengan Pengelola Paguyuban Vulcano Tour, pada tanggal 15 Mei 2018).

Namun, berdasarkan wawancara pada tanggal 15 Mei 2018 dengan pengelola Paguyuban Vulcano Tour terdapat kembali permasalahan yang dihadapi

oleh Vulcano Tour selain faktor alam, adanya persengketaan pengelolaan pintu masuk tiket retribusi antara masyarakat dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata belum mencantumkan maupun menggambarkan peta lokasi pariwisata Vulcano Tour, dan infrastruktur jalan menuju pariwisata Vulcano Tour masih dalam kondisi kurang baik. Hal ini memperlihatkan kurangnya koordinasi dari pemerintah daerah terhadap Vulcano Tour dalam pemulihan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kerjasama sangat diperlukan untuk menunjang keberlangsungan suatu program yang sedang dijalankan. Sumarto (2009:116) menerangkan bahwa *Partnership* atau kemitraan merupakan hubungan yang terjadi antara *civil society*, pemerintah dan atau sektor swasta dalam rangka mencapai suatu tujuan yang didasarkan pada prinsip kepercayaan, kesetaraan, dan kemandirian.

Kemudian menurut Ditjen P2L & PM dalam Kuswidanti (2008:22), menerangkan mengenai keberhasilan kemitraan dapat diukur dengan memahami prinsip-prinsip indikator input, indikator proses, indikator output dan indikator outcome. Melalui kemitraan diharapkan dapat secara cepat bersimbiosis mutualistik, sehingga kekurangan dan keterbatasan pengelolaan usaha dapat teratasi.

Dengan mempertimbangkan potensi, serangkaian aktivitas pemberdayaan masyarakat Desa Umbulharjo melalui pengembangan wisata, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Di Obyek Wisata Gunung Merapi ‘*Vulcano*

Tour' Kecamatan Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Di Obyek Wisata Gunung Merapi '*Vulcano Tour*' Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana peran Desa Umbulharjo Dalam Pengembangan Pariwisata Di Obyek Wisata Gunung Merapi '*Vulcano Tour*' Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi Pemerintah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Cangkringan Dalam Pengembangan Pariwisata Di Obyek Wisata Gunung Merapi '*Vulcano Tour*' Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Di Obyek Wisata Gunung Merapi '*Vulcano Tour*' Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman.

2. Mengetahui peran Desa Umbulharjo Dalam Pengembangan Pariwisata Di Obyek Wisata Gunung Merapi '*Vulcano Tour*' Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman.
3. Mengetahui hambatan yang dihadapi Pemerintah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Di Obyek Wisata Gunung Merapi '*Vulcano Tour*' Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1) Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini adalah dapat memperkaya kajian-kajian bagi akademisi khususnya dalam kajian Ilmu Pemerintahan terutama peran masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pengembangan obyek wisata.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan-kebijakan di bidang peran masyarakat khususnya obyek wisata Vulcano Tour di Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi masyarakat sekitar dalam mengembangkan obyek wisata yang ada dan menambah penghasilan masyarakat.

c. Bagi Kajian Sejenis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada mahasiswa tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam mengelola obyek wisata Vulcano Tour dalam melakukan penelitian yang sejenis.

E. Kajian Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku maupun jurnal dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Perwitasari (2015) dengan judul Pemberdayaan Ekonomi Paguyuban Pedagang Dalam Pengembangan Pariwisata Di Obyek Wisata Grojogan Sewu Kabupaten Karanganyar. Penelitian yang bertujuan untuk memahami pemberdayaan ekonomi paguyuban pedagang dalam pengembangan pariwisata di obyek wisata Grojogan Sewu Kabupaten Karanganyar. Desain penelitian yang dipakai

adalah deskriptif kualitatif, digunakan untuk melengkapi fenomena secara mendalam dan tuntas. Pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi maupun dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi yang dilakukan di obyek wisata Grojogan Sewu sudah berjalan dengan baik namun perlu dioptimalkan. Pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan pembentukan paguyuban pedagang, pembentukan pokdarwis, kegiatan sosial, perekrutan pengelola obyek wisata Grojogan Sewu dengan mengutamakan warga sekitar, pelestarian adat, penanaman pohon, pembagian bak sampah. Aktor dalam pemberdayaan ekonomi meliputi pemerintah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri, karang taruna dan pertemuan rutin. Kendala dalam pemberdayaan ekonomi meliputi: adanya kelompok paguyuban yang tidak mau berusaha, rendahnya komitmen anggota paguyuban, kurangnya komunikasi yang menimbulkan perbedaan persepsi. Dampak positif pemberdayaan ekonomi yaitu meningkatnya pendapatan, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan wawasan dan ketrampilan, menggugah kesadaran lingkungan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Andriyani (2017) dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan

Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali). Penelitian ini bertujuan untuk memahami berlangsungnya proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Wisata Penglipuran dan implikasinya terhadap ketahanan sosial budaya wilayah. Hasil penelitian diketahui bahwa proses pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Penglipuran berlangsung dalam tiga tahap yaitu tahap penyadaran, pengkapasitasan dan pemberian daya. Bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Adapun kendala-kendala dalam pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan usaha mempertahankan budaya dan adat istiadat dari arus modernisasi, sikap masyarakat, terbatasnya sumber daya manusia dan ketersediaan akomodasi wisata serta kurangnya kegiatan promosi. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata memberikan implikasi terhadap ketahanan sosial budaya wilayah berupa penguatan dan beberapa perubahan pada tata nilai sosial, budaya dan lingkungan.

3. Penelitian yang dilakukan Afandy (2017) dengan judul Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Bahari Pulau Gili Noko Kabupaten Gresik (Studi Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gresik). Pulau Gili Noko merupakan salah satu destinasi wisata bahari di Kabupaten Gresik yang memiliki potensi berupa keindahan terumbu karang dan biota laut yang layak dikembangkan menjadi sebuah destinasi wisata. Akan tetapi berdasarkan kondisi saat ini

potensi tersebut masih belum didukung dengan aksesibilitas dan jugafasilitas yang memadai sehingga perlu adanya peran pemerintah daerah khususnya Disbudparpora sebagai salah satu stakeholder yang memiliki wewenang dalam pengembangan destinasi wisata di daerahnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan (1) Mengetahui peran pemerintah daerah (Disbudparpora) dalam mengembangkan destinasi wisata Pulau Gili Noko. (2) Mengetahui faktor penghambat dan faktor pendorong dalam melakukan pengembangan destinasi wisata di Pulau Gili Noko. Sumber data diperoleh dari informan, observasi, dokumen, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

F. Kajian Teori

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat.

Kartasmita (Anwar 2007:10) mengemukakan bahwa proses peningkatan kesejahteraan masyarakat, dapat diterapkan berbagai pendekatan, salah satu diantaranya adalah pemberdayaan masyarakat.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat bukan hal yang sama sekali baru, tetapi sebagai strategi dalam pembangunan relatif belum terlalu lama dibicarakan. Istilah dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dengan individu lainya dalam masyarakat untuk membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Memberdayakan itu meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat.

Secara etimologis pemberdayaan berasal pada kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya atau kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya atau kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (Teguh, Ambar S, 2004: 77).

Menurut Sumodiningrat (Teguh, Ambar S, 2004: 78) menyampaikan: Pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia dari pada Barat. Di Barat tersebut diterjemahkan sebagai *empowerment*, dan istilah itu benar tetapi tidak tepat. Pemberdayaan yang kita maksud adalah memberi “daya” bukanlah “kekuasaan”. *Empowerment* dalam khasanah barat lebih bermakna

“pemberian kekuasaan” dari pada “pemberdayaan” itu sendiri. Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, menurut Winarni (Teguh, Ambar S (2004: 79) mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowerment*), serta terciptanya kemandirian.

b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan dari suatu pemberdayaan masyarakat adalah adanya tujuan yang dicapai seperti yang di kemukakan oleh Ambar Teguh S (2004:80) bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Dengan demikian untuk menjadi mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisikmaterial. Pemberdayaan masyarakat

mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi afektif adalah merupakan *sense* yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan. Jadi tujuan dari pemberdayaan masyarakat yaitu untuk memberikan kontribusi untuk mencapai kemandirian masyarakat yang diperlukan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dan menjadikan masyarakat yang dapat mempergunakan daya kognitif, afektif serta psikomotorik yang dimilikinya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi di lingkungan internal maupun eksternal masyarakat.

c. Tahap-tahap Pemberdayaan Masyarakat

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat berlangsung secara bertahap seperti yang dikemukakan oleh Ambar Teguh S (2004: 83). Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi :

- 1) Tahap kesadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa memburuhkan peningkatan kapasitas diri.

- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

d. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga/ kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan (IPusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002). Hutomo (2000) menjelaskan pemberdayaan adalah terjemahan dari *empowerment*, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari *empower*. Menurut merriam Webster dan Oxford English Dictionary (dalam Hutomo, 2000), kata *empower* mengandung dua pengertian, yaitu:

“(1) *to give power* atau *authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (2) *to give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan”.

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses

terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya (Hutomo, 2000).

e. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Sumodiningrat (1999) menjelaskan konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat adalah semua warga negara.
- 2) Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka

pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.

- 3) Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: (1) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya; (2) penguatan kelembagaan; (3) penguasaan teknologi; dan (4) pemberdayaan sumberdaya manusia.
- 4) Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
- 5) Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah: (1) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); (2) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar *price taker*; (3) pelayanan pendidikan dan kesehatan; (4) penguatan industri kecil; (5) mendorong munculnya wirausaha baru; dan (6) pemerataan spasial 6.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: (1) peningkatan akses bantuan modal usaha; (2) peningkatan akses pengembangan SDM; dan (3) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

Menurut Hutomo (2000) konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut:

- 1) Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi
- 2) Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran
- 3) Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi
- 4) Kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan

pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (*empowerment of the powerless*).

f. Pola-pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Disamping itu masyarakat juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak amil zakat, inilah yang membedakan antara partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat. Perlu difikirkan siapa sesungguhnya yang menjadi sasaran pemberdayaan masyarakat, sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun, dengan ini *good governance* yang telah dimasukan sebagai suatu pendekatan yang dipandang paling relevan, baik dalam tatanan pemerintahan secara luas maupun dalam menjalankan fungsi pembangunan. *Good governance* adalah tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjalin adanya proses kesejahteraan, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan komponen pemerintah, rakyat dan usahawan swasta (Hutomo, 2000).

Dalam kondisi ini mengetengahkan tiga pilar yang harus diperlukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketiga pilar

tersebut adalah pemerintah, swasta dan masyarakat yang hendaknya menjalin hubungan kemitraan yang selaras. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Pemberdayaan masyarakat hendaknya mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses.

Ada dua upaya agar pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa dijalankan, diantaranya *pertama*, mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha. Kiat yang pertama dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan bekerja. Dengan memberikan bekal pelatihan, akan menjadi bekal yang amat penting ketika akan memasuki dunia kerja. Bentuk pemberdayaan yang *kedua*, adalah dengan pendidikan (Hutomo, 2000).

1) Mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha

Program pembinaan untuk menjadi seorang wiraswasta ini dapat dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan, diantaranya :

a) Memberikan bantuan motivasi moril

Bentuk motivasi moril ini berupa penerangan tentang fungsi, hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya yang pada intinya manusia diwajibkan beriman, beribadah, bekerja dan berikhtiar dengan sekuat tenaga sedangkan hasil

akhir dikembalikan kepada Dzat yang Maha Pencipta.

Bentuk-bentuk motifasi moril itu adalah:

1. Pelatihan Usaha

Melalui pelatihan ini setiap peserta diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk beluk permasalahan yang ada didalamnya. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan aktual sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap masyarakat disamping diharapkan memiliki pengetahuan teknik kewirausahaan dalam berbagai aspek.

Pelatihan sebaiknya diberikan lebih aktual, dengan mengujikan pengelolaan praktek hidup berwirausaha, baik oleh mereka yang memang bergelut di dunia usaha, atau contoh-contoh konkrit yang terjadi dalam praktek usaha. Melalui pelatihan semacam ini diharapkan dapat mencermati adanya kiat-kiat tertentu yang harus ia jalankan, sehingga dapat dihindari sekecil mungkin adanya kegagalan dalam pengembangan kegiatan wirausahanya.

2. Permodalan

Permodalan dalam bentuk uang merupakan salah satu faktor penting dalam dunia usaha, tetapi bukan yang terpenting untuk mendapatkan dukungan keuangan, baik perbankan maupun dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya.

Penambahan modal dari lembaga keuangan, sebaiknya diberikan, bukan untuk modal awal, tetapi untuk modal pengembangan, setelah usaha itu dirintis dan menunjukkan prospeknya yang cukup baik, karena jika usaha itu belum menunjukkan perkembangan profit yang baik, sering kali bank tidak akan memberikan pinjaman.

2) Pendidikan

Bentuk pemberdayaan yang *kedua*, adalah dengan pendidikan. Kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan, oleh karenanya untuk mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang adalah dari sektor pendidikan, karena kemiskinan ini kebanyakan sifatnya turun-menurun, dimana orang tuanya miskin sehingga tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya, dan hal ini akan menambah daftar angka kemiskinan kelak di kemudian hari.

Bentuk pemberdayaan di sektor pendidikan ini dapat disalurkan melalui dua cara, pertama pemberian beasiswa bagi anak yang kurang mampu, dengan diberikannya beasiswa otomatis meringankan beban orang tua dan sekaligus meningkatkan kemauan belajar, kedua penyediaan sarana dan prasarana, proses penyalurannya adalah dengan menyediakan proses tempat belajar formal atau pun non formal, atau paling tidak dana yang di salurkan untuk pendidikan ini selain untuk beasiswa juga untuk pembenahan fasilitas sarana dan prasarana belajar, karena sangat tidak mungkin menciptakan seorang pelajar yang berkualitas dengan sarana yang minim (Hutomo, 2000).

2. Pengembangan Desa Wisata

a. Desa Wisata

Desa Wisata adalah desa yang memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas, baik berupa karakter fisik lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan sosial budaya kemasyarakatan yang dikelola dan dikemas secara menarik dan alami dengan pengembangan fasilitas pendukung wisatanya, dalam suatu tata lingkungan yang harmonis dan pengelolaan yang baik dan terencana sehingga siap untuk menerima dan menggerakkan kunjungan wisatawan ke desa tersebut,serta mampu menggerakkan aktifitas ekonomi pariwisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan

pemberdayaan masyarakat setempat (Muliawan, 2008). Menurut Muliawan (2008) prinsip pengembangan desa wisata adalah sebagai salah satu produk wisata alternatif yang dapat memberikan dorongan bagi pembangunan pedesaan yang berkelanjutan serta memiliki prinsip-prinsip pengelolaan antara lain:

- 1) Memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat.
- 2) Menguntungkan masyarakat setempat.
- 3) Berskala kecil untuk memudahkan terjalinnya hubungan timbal balik dengan masyarakat setempat.
- 4) Melibatkan masyarakat setempat.
- 5) Menerapkan pengembangan produk wisata pedesaan.

b. Kriteria Desa Wisata

Menurut Muliawan (dalam Atmoko 2014) Kriteria dari desa wisata adalah sebagai berikut :

- 1) Memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas (sebagai atraksi wisata), baik berupa karakter fisik lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan sosial budaya kemasyarakatan.
- 2) Memiliki dukungan dan kesiapan fasilitas pendukung kepariwisataan terkait dengan kegiatan wisata pedesaan, yang antara lain dapat berupa : akomodasi/penginapan, ruang interaksi masyarakat dengan wisatawan/tamu, atau fasilitas pendukung lainnya.

- 3) Memiliki interaksi dengan pasar (wisatawan) yang tercermin dari kunjungan wisatawan ke lokasi desa tersebut.
- 4) Adanya dukungan, inisiatif dan partisipasi masyarakat setempat terhadap pengembangan desa tersebut terkait dengan kegiatan kepariwisataan (sebagai desa wisata).

c. Komponen Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan adalah suatu proses atau cara menjadikan sesuatu menjadi maju, baik, sempurna, dan berguna (Suwanto, 1997). Suwanto (1997) menyebutkan beberapa bentuk produk pariwisata alternatif yang berpotensi untuk dikembangkan, yaitu: Pariwisata budaya (*cultural tourism*), ekowisata (*eco-tourism*), pariwisata bahari (*marine tourism*), pariwisata petualangan (*adventure tourism*), pariwisata agro (*agrotourism*), pariwisata perdesaan (*village tourism*), gastronomi (*culinary tourism*), pariwisata spiritual (*spiritual tourism*) dan lainnya.

World Tourism Organization (dalam Abdillah, 2016) menggambarkan destinasi pariwisata atas enam elemen, yaitu: *Attraction, Public and Private Amenities, Accesibilities, Human Resources, Image and Character, Price.*

- 1) *Attractions*. Umumnya menjadi fokus perhatian pengunjung dan dapat memberikan motivasi awal bagi wisatawan untuk berkunjung. Atraksi bisa dikategorikan sebagai atraksi wisata alam (pantai, pegunungan, taman, cuaca), bangunan, budaya.

Keberadaannya bisa di ruang publik seperti taman alam, situs budaya atau sejarah atau bisa di komunitas masyarakat seperti budaya, warisan atau gaya hidup. Bisa juga berupa keunikan dan emosional atau pengalaman yang memicu ketertarikan wisatawan untuk berkunjung.

- 2) *Amenities*. Berupa layanan dan fasilitas yang mendukung termasuk infra-struktur dasar untuk peng-unjung, transportasi umum, dan jalan serta pelayanan langsung bagi pengunjung seperti akomodasi, informasi pengunjung, fasilitas rekreasi, panduan, operator dan fasilitas makan dan minum serta fasilitas belanja.
- 3) *Accessibility*. Kemudahan pengunjung untuk mencapai tujuan wisata melalui jalan darat, jalur udara, kereta api maupun jalur laut. Pengunjung harus juga dapat melakukan perjalanan dengan relatif mudah dan persyaratan visa, masuk pelabuhan, dan kondisi jalur masuk tertentu harus menjadi bagian dari aksesibilitas.
- 4) *Human Resources*. Pariwisata adalah industri padat karya dan interaksi dengan masyarakat lokal merupakan aspek penting dari pengalaman pariwisata. Tenaga kerja pariwisata terlatih beserta masyarakat yang menyadari manfaat dan tanggung jawab terkait dengan pertumbuhan pariwisata merupakan elemen yang sangat

diperlukan dan perlu dikelola sesuai dengan strategi tujuan wisata.

- 5) *Image*. Adalah suatu yang unik atau gambaran penting dalam menarik pengunjung untuk berkunjung. Fasilitas dan atraksi yang baik tidaklah cukup jika pengunjung tidak dapat membayangkan atau memahaminya ataupun tidak menyadarinya. Berbagai cara dapat digunakan untuk mempromosikan citra daya tarik wisata (misalnya dengan pemasaran dan branding, travel media, *e-marketing*). Yang termasuk dalam citra tujuan wisata adalah keunikan, pemandangan, adegan, kua-litas lingkungan, keselamatan, tingkat layanan, dan keramahan.
- 6) *Price*. Harga merupakan aspek penting dari persaingan antar tujuan wisata. Faktor harga berhubungan dengan biaya transportasi ke dan dari tujuan serta biaya jasa akomodasi, atraksi, makanan dan *tour*. Keputusan turis juga dapat didasarkan pada fitur ekonomi lainnya seperti nilai tukar mata uang.

Dalam perencanaannya pengembangan daya tarik wisata harus memperhatikan lima tahap proses perencanaan pariwisata (A. Yoeti, 2008:53) yaitu melakukan inventarisasi mengenai semua fasilitas yang tersedia dan potensi yang dimiliki, menaksir pasaran pariwisata dan mencoba melakukan proyeksi arus kedatangan wisatawan pada masa yang akan datang, memperhatikan di mana terdapat permintaan yang lebih besar dari pada persediaan atau penawaran, melakukan

penelitian kemungkinan perlunya penanaman modal baik negeri maupun asing, melakukan perlindungan terhadap kekayaan alam yang dimiliki dan memelihara warisan budaya bangsa serta adat istiadat suatu bangsa yang ada.

Pengembangan daya tarik wisata harus memperhatikan elemen destinasi pariwisata, prinsip-prinsip ekowisata untuk menjaga kelestarian lingkungan alam sebagai potensi dasar dari wisata bahari. Pengembangan harus dapat memenuhi harapan wisatawan. Harapan wisatawan dapat diketahui melalui tanggapannya terhadap kondisi eksisting daerah tujuan wisata dan selanjutnya menyusun strategi pengembangan dalam meningkatkan kualitasnya sehingga yang menjadi harapan wisatawan, target kunjungan wisatawan yang ingin dicapai oleh pemerintah pusat, daerah dan juga pengelola serta masyarakat sekitar daerah tujuan wisata dapat terwujud.

Komponen-komponen dalam pengembangan desa wisata menurut (Karyono, 1997) adalah:

- 1) Atraksi dan kegiatan wisata, atraksi wisata dapat berupa seni, budaya, warisan sejarah, tradisi, kekayaan alam, hiburan, jasa dan lain lain yang merupakan daya tarik wisata. Atraksi ini memberikan ciri khas daerah tersebut yang mendasari minat wisatawan untuk berkunjung ke tempat tersebut. Kegiatan wisata adalah apa yang dikerjakan wisatawan atau apa motivasi

wisatawan datang ke destinasi yaitu keberadaan mereka disana dalam waktu setengah hari sampai berminggu - minggu.

- 2) Akomodasi, akomodasi pada desa wisata yaitu sebagian dari tempat tinggal penduduk setempat dan atau unit - unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk.
- 3) Unsur institusi atau kelembagaan dan SDM, dalam pengembangan desawisatalembagayangmengelola harus memiliki kemampuan yang handal.
- 4) Fasilitas pendukung wisata lainnya, pengembangan desa wisata harus memiliki fasilitas- fasilitas pendukung seperti sarana komunikasi.
- 5) Infrastruktur lainnya, insfrastruktur lainnya juga sangat penting disiapkan dalam pengembangan desa wisata seperti sitem drainase.
- 6) Transportasi, transportasi sangat penting untuk memperlancar akses tamu.
- 7) Sumber daya lingkungan alam dan soasial budaya.
- 8) Masyarakat, dukungan masyarakat sangat besar peranannya seperti menjaga kebersihan lingkungan, keamanan, keramah tamahan.
- 9) Pasar domestik dan Mancanegara, pasar desa wisata dapat pasar wisata domestik maupun mancanegara.

3. Peran Pemerintah dalam mengembangkan potensi wisata

Davey (1998:21) memaparkan bahwa terdapat lima fungsi utama pemerintahan, antara lain adalah pertama, sebagai penyedia layanan, yaitu fungsi-fungsi pemerintahan yang berkaitan dengan penyediaan layanan yang beorientasi pada lingkungan dan masyarakatnya. Kedua, fungsi pengaturan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan perumusan dan penegakan peraturan-peraturan. Ketiga, fungsi pembangunan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Keempat, fungsi perwakilan, yaitu mewakili masyarakat diluar wilayah mereka. Kelima, fungsi koordinasi, yaitu berkaitan dengan peran pemerintah dalam pengkoordinasian, perencanaan, investasi dan tata guna lahan.

Pemerintah merupakan salah satu *stakeholder* di dalam pengelolaan bidang pariwisata. Pemerintah juga memiliki fungsi sebagai pembuat berbagai kebijakan tentang pariwisata pada suatu daerah serta berperan dalam meningkatkan devisa dan pendapatan asli daerah melalui bidang pariwisata. Pemerintah daerah dalam hal ini Desa Umbulharjo yang menaungi bidang kepariwisataan diharapkan memiliki peran dalam menyediakan pariwisata di daerahnya dengan cara mengembangkan daya tarik serta saran kepariwisataan lainnya. Hal tersebut akan mampu terwujud jika pemerintah selaku pemegang kepentingan mampu mengembangkan pariwisata secara optimal.

Menurut Subadra (2006) pemerintah memiliki beberapa peran dalam bidang pariwisata yaitu:

1. Perencanaan Pariwisata
2. Pembangunan Pariwisata
3. Kebijakan pariwisata
4. Peraturan Pariwisata

Peran Desa dalam mengembangkan potensi wisata museum adalah suatu usaha yang dilakukan oleh dinas dalam kaitannya dengan wewenang yang dimilikinya untuk mengembangkan wisata Vulkano Tour, yang mencakup dari seluruh penyediaan fasilitas pendukung pariwisata dan kerjasama yang sinergis dengan berbagai stakeholder pariwisata.

Terdapat dua peran pemerintah dalam hal kebijakan yakni peran legislasi (pembuatan undang-undang atau aturan), dan kebijakan yang berkaitan dengan industri pariwisata (Jeffries, 2001). Menurut Jeffries, kebijakan yang berkaitan dengan legislasi berkaitan dengan bagaimana aturan-aturan dalam suatu destinasi, misalnya keimigrasian, perlindungan konsumen, keamanan jalan, perlindungan lingkungan alam dan buatan, serta aturan-aturan yang berkaitan dengan kepariwisataan. Kebijakan yang berkaitan dengan industri pariwisata adalah segala hal yang berhubungan dengan industri pariwisata dan hal-hal yang berhubungan dengan pelanggannya (*its customer*), kebijakan atau aturan tentang persaingan dalam usaha pariwisata, tenaga kerja, keberlanjutan lingkungan, perpajakan, transportasi dan visa, dll.

G. Definisi Konseptual

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep untuk membahas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Cangkringan Dalam Pengembangan Pariwisata Di Obyek Wisata Gunung Merapi '*Vulcano Tour*' Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman.

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya (Hutomo, 2000)

2. Pengembangan Pariwisata Obyek Wisata

Pengembangan adalah suatu proses atau cara menjadikan sesuatu menjadi maju, baik, sempurna, dan berguna. Hadiwijoyo (2012) mendefinisikan desa wisata adalah suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian perdesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman dan kebutuhan wisata lainnya.

3. Peran Pemerintah dalam pemberdayaan wisata

Terdapat dua peran pemerintah dalam hal kebijakan yakni peran legislasi (pembuatan undang-undang atau aturan), dan kebijakan yang berkaitan dengan industri pariwisata (Jeffries, 2001). Menurut Jeffries, kebijakan yang berkaitan dengan legislasi berkaitan dengan bagaimana aturan-aturan dalam suatu destinasi, misalnya keimigrasian, perlindungan konsumen, keamanan jalan, perlindungan lingkungan alam dan buatan, serta aturan-aturan yang berkaitan dengan kepariwisataan. Kebijakan yang berkaitan dengan industri pariwisata adalah segala hal yang berhubungan dengan industri pariwisata dan hal-hal yang berhubungan dengan pelanggannya (*its customer*), kebijakan atau aturan tentang persaingan dalam usaha pariwisata, tenaga kerja, keberlanjutan lingkungan, perpajakan, transportasi dan visa, dll.

H. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan alur penulis dalam melakukan penelitian. Definisi operasional dibuat berdasarkan permasalahan dan fokus penelitian, serta menggambarkan secara singkat alur penelitian yang akan dilakukan.

Menurut Sofian Effendi (2006: 46) definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Penelitian terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Di Obyek Wisata Gunung Merapi '*Vulcano Tour*'

Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman, akan menganalisis data dengan menggunakan indicator indicator sebagai berikut:

1. Indikator dari Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang meliputi:
 - a. Mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha
 - b. Memberikan bantuan motivasi moril
 - 1) Pelatihan Usaha
 - 2) Permodalan
2. Hambatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Di Obyek Wisata Gunung Merapi '*Vulcano Tour*' Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman.
3. Peran pemerintah dalam pemberdayaan

Indikator:

- a. Input
- b. Proses
- c. *Output*
- d. *Outcome*.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Bodgan dan Taylor (dalam Moleong, 2007:4) mengemukakan bahwa metode deskriptif digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasikan deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data kualitatif merupakan sumber dari deskriptif yang

luas dan berlandasan kokoh, serta memuat penjelasan detail tentang proses-proses yang terjadi dalam ruang lingkup setempat. Penelitian kualitatif merupakan wujud kata-kata daripada deretan angka.

Metode penelitian kualitatif dengan penelitian yang menghasilkan data. Data yang dianalisis di dalamnya berbentuk deskriptif atau lebih kita kenal sebagai penjelasan dan tidak berupa angka-angka seperti halnya pada penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan menggunakan berbagai metode yang ada.

Untuk melakukan sebuah penelitian kualitatif, perlu mengetahui tahap-tahap yang akan dilalui dalam proses penelitian (dalam Moleong, 2007). Tahapan ini disusun secara sistematis agar diperoleh data secara sistematis pula. Ada empat tahap yang bisa dikerjakan dalam suatu penelitian, yaitu:

- a. Tahap Pra-lapangan
 - 1) Menyusun rancangan penelitian
 - 2) Memilih lapangan penelitian
 - 3) Memilih dan Memanfaatkan Informan
 - 4) Menyiapkan Perlengkapan Penelitian
- b. Tahap Lapangan

Dalam tahap ini dibagi atas tiga bagian yaitu:

- 1) Memahami latar penelitian dan persiapan diri
- 2) Memasuki Lapangan

3) Berperan serta sambil mengumpulkan data

c. Tahap Analisa Data

Analisa data merupakan suatu tahap mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar agar dapat memudahkan dalam menentukan tema dan dapat merumuskan hipotesa kerja yang sesuai dengan data (Moleong, 2007:103).

Pada tahap ini data yang diperoleh dari berbagai sumber, dikumpulkan, diklasifikasikan dan analisa dengan komparasi konstan.

d. Tahap Penulisan Laporan

Penulisan laporan merupakan hasil akhir dari suatu penelitian, sehingga dalam tahap akhir ini peneliti mempunyai pengaruh terhadap hasil penulisan laporan. Penulisan laporan yang sesuai dengan prosedur penulisan yang baik karena menghasilkan kualitas yang baik pula terhadap hasil penelitian.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Bagaimana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Di Obyek Wisata Gunung Merapi '*Vulcano Tour*' Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman dan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Masyarakat Cangkringan dan pemerintah Cangkringan. Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan suatu data. Menurut Arikunto (2006:200) subjek penelitian adalah benda, hal atau organisasi tempat data atau variabel penelitian yang dipermasalahkan melekat. Tidak ada satu pun

penelitian yang dapat dilakukan dengan tidak adanya subjek penelitian, karena seperti yang telah diketahui bahwa dilaksanakannya penelitian dikarenakan adanya masalah yang harus dipecahkan, maksud dan tujuan penelitian adalah untuk memecahkan persoalan yang timbul tersebut. Hal ini dilakukan dengan jalan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari informan.

Objek penelitian menjelaskan tentang apa atau siapa yang menjadi objek penelitian juga dimana dan kapan penelitian dilakukan, bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu (Umar, 2003). Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan *reliable* tentang suatu hal (variabel tertentu) (Sugiyono, 2014).

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban (Moloeng, 2006:186). Wawancara dipergunakan untuk mengadakan komunikasi dengan subjek penelitian sehingga diperoleh data-data yang diperlukan. Teknik wawancara ini diperoleh langsung dari subyek penelitian melalui tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan pokok permasalahan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri atas penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa itu dan ditulis dengan sengaja untuk menyimpulkan dan meluruskan keterangan mengenai peristiwa tersebut. Menurut Arikunto (2006: 129) didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.

4. Sumber Data

Untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, peneliti menggunakan :

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari responden/narasumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam serta melakukan pengamatan langsung pada saat penelitian (observasi). Sumber data primer dalam penelitian ini diambil dari

- 1) Pegawai Pemerintah Desa Umbulharjo,
- 2) Pengelola Paguyuban Vulcano Tour.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan, arsip resmi, serta literatur yang sesuai.

5. Teknik Analisis Data

Bodgan dan Biklen (dalam Moleong, 2007) mengemukakan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data ini akan dilakukan agar proses penyusunan data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat ditafsirkan. Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik deskripsi analisis kualitatif, dimana peneliti akan menggambarkan keadaan atau fenomena yang diperoleh dan kemudian akan menganalisis dalam bentuk kata-kata untuk memperoleh kesimpulan. Metode deskriptif analitik dalam bentuk kata-kata untuk memperoleh kesimpulan. Metode deskriptif analitik digunakan dalam penganalisisan data yang sudah ada. Metode ini digunakan untuk menggambarkan data-data yang sudah diperoleh melalui proses analisis yang mendalam dan selanjutnya dikomunikasikan secara runtut atau dalam bentuk naratif.

Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2008:246), aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Tahap analisis data adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil wawancara di lapangan.

b. Reduksi Data

Reduksi data yaitu memilah hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus peneliti. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengayaskan data-data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan atau mempermudah peneliti untuk mencari sewaktu-waktu diperlukan.

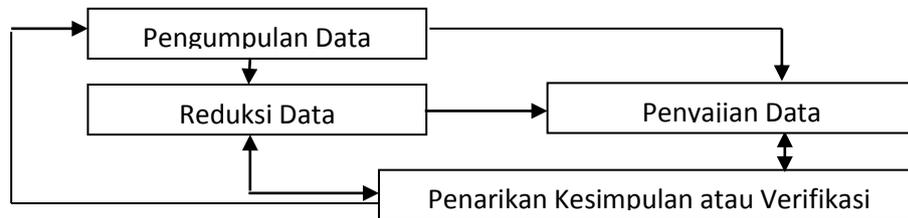
c. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang diberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. penyajian data merupakan analisis dalam bentuk *matrik*, *network*, *chart* atau grafis sehingga peneliti dapat menguasai data.

d. Pengambilan Kesimpulan atau Verifikasi

Peneliti berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya, jadi dari data tersebut peneliti mencoba mengambil kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat

dalam penelitian. Keempatnya dapat digambarkan dalam bagan berikut (Miles & Huberman, 1992:20):



Bagan Komponen-komponen data model Interaktif

Sumber: Miles dan Huberman (1992:17)

Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait. Diawali dengan peneliti melakukan penelitian di lapangan yaitu Bagaimana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Cangkringan Dalam Pengembangan Pariwisata Di Obyek Wisata Gunung Merapi '*Vulcano Tour*' Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Setelah itu diadakan seleksi data atau penyederhanaan.